

**PEMBANGUNAN SOSIAL MASYARAKAT PERBATASAN  
DI KECAMATAN SAJINGAN BESAR KABUPATEN SAMBAS  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
*SOCIAL DEVELOPMENT OF THE BORDER COMMUNITY  
IN THE SAJINGAN BESAR SUB-DISTRICT SAMBAS REGENCY  
WEST KALIMANTAN PROVINCE*

**Mufizar<sup>1</sup>, Arkanudin<sup>2</sup>, M. Sabran Achyar<sup>3</sup>**

*Program Studi Ilmu Sosiologi  
Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura*

**ABSTRAK**

Judul penelitian ini adalah Pembangunan Sosial Masyarakat Perbatasan Di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Objek penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sajingan Besar yang merupakan satu Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia. Tujuan dari penelitian ini adalah. *Pertama*, penulis ingin mengidentifikasi dan menggambarkan proses- proses pembangunan sosial dalam bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. *Kedua*, Penulis ingin menganalisis dampak dari proses-proses pembangunan sosial daerah perbatasan yang terjadi setelah dibukanya lintas batas antara Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas dan Serawak (Malaysia timur). *Ketiga* ingin mengetahui dan mengungkapkan hambatan- hambatan yang terjadi dalam proses pembangunan sosial masyarakat perbatasan, hal yang paling mencolok dan sangat diperlukan pengembangannya segera adalah pengembangan di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan dan pengentasan kemiskinan terdapat kesan kuat bahwa wilayah perbatasan terkesan tertinggal di tiga bidang tersebut.

**Kata Kunci:** *Perbatasan, Pendidikan, Kesehatan dan Kemiskinan*

**ABSTRACT**

The title of this research is “*Social Development the Community Border in District Sajingan Besar Sambas Ragency in West Kalimantan*”. The Object of research was conducted in the district which is a Sajingan Besar district directly adjacent to Sarawak Malaysia. The purpose of this research is. *First*, the author would like to identify and portray the processes of social development in the areas of education, health care, and poverty alleviation. *Second*, the authors would like to analyze the impact of the social development processes that take place after the border areas of cross-border opening between the Sajingan Besar Sambas district and Sarawak (East Malaysia). All three wanted to know and express the constraints that occur in the process of social development of border communities, the most striking and immediate development is indispensable in the development of education, health care and poverty alleviation are strong impression that the border region lagging impressed trihedron.

**Keywords:** *Border, Education, Healthy and Poverty*

---

<sup>1</sup> Pegawai Negeri Sipil Kantor Inspektorat Kabupaten Sambas.

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

<sup>3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Kawasan perbatasan suatu negara memiliki peran penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Pembangunan wilayah perbatasan pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Kawasan perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, hal tersebut ditunjukkan oleh karakteristik kegiatan yang mempunyai dampak penting bagi kedaulatan negara, menjadi faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar negara, serta mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) bekerjasama dengan Universitas Tanjungpura dalam laporan Penelitiannya mengatakan: Kawasan perbatasan dengan negara tetangga merupakan wilayah yang secara khusus perlu diperhatikan. Pemerintah bermaksud mendorong perbaikan kawasan perbatasan sehingga menjadi “beranda depan” negara, termasuk kawasan perbatasan Kalimantan (Barat dan Timur) dengan Sarawak dan Sabah (Kasaba). Dengan spesifikasi dan nilai strategis kawasan perbatasan, Pemerintah Daerah memerlukan kewenangan yang besar untuk dapat mengembangkan kawasan perbatasan menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru di era otonomi daerah saat ini. Namun demikian, dalam pelaksanaannya walaupun sudah ada UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Pemerintah Daerah belum memiliki kewenangan yang jelas. (Laporan Penelitian Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Perbatasan di Era Otonomi daerah (Studi Kasus di Kalimantan Barat, 2009: i). Berdasarkan kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan pemerintah Indonesia dan Malaysia mengenai kawasan perbatasan yang dilakukan di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 12-13 April 2002, telah disepakati beberapa daerah yang menjadi pintu masuk (*entry point*) untuk masing-masing Negara. Untuk wilayah Provinsi Kalimantan Barat sendiri memiliki 16 *entry points*, dimana Temajuk, Liku, Sajingan Besar, dan Aruk termasuk di dalamnya. Kawasan perbatasan antar negara memiliki potensi strategis bagi berkembangnya kegiatan perdagangan internasional yang saling menguntungkan. Kawasan ini juga berpotensi besar menjadi pusat pertumbuhan wilayah, terutama dalam hal pengembangan industri, perdagangan dan pariwisata. Hal ini akan memberikan peluang bagi peningkatan kegiatan produksi yang selanjutnya akan menimbulkan berbagai efek pengganda (*multiplier effects*). (Mukti, 2001).

Pada saat ini kawasan perbatasan belum dikelola secara baik dan belum adanya konsepsi pembangunan yang jelas, komprehensif dan integratif. Kegiatan pembangunan yang ada masih berupa rencana pembangunan parsial dengan pendekatan yang sangat sektoral. Sebagai contoh adanya eksploitasi kawasan hutan (legal dan ilegal) dengan sasaran pokok pertumbuhan ekonomi atau pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal. Kawasan perbatasan Kabupaten Sambas yang terletak di sebelah utara Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur), sebagaimana kawasan perbatasan lainnya di Kalimantan memiliki potensi yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Selain memang adanya keterbatasan baik fisik maupun sosial ekonomi di daerah ini, juga dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya antara lain adalah munculnya banyak permasalahan di kawasan ini, seperti kesenjangan ekonomi (kemiskinan), ketertinggalan pembangunan (insfrastuktur, Pendidikan, Kesehatan), dan keterisolasian kawasan. Pada umumnya daerah perbatasan belum mendapat perhatian secara proporsional dari pemerintah, kondisi tersebut terbukti dari kurangnya sarana prasarana pembangunan daerah perbatasan, serta rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Salah satu kebijakan pembangunan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sambas untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, antara lain mengatasi masalah pengentasan kemiskinan, pengentasan buta aksara (Pendidikan) dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat adalah dengan melalui pengembangan wilayah perbatasan. Program pengembangan dan pembangunan kawasan perbatasan Paloh –Sajingan Besar ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pembangunan pada kawasan perbatasan yang selama ini dikenal sebagai kawasan tertinggal. Untuk mengembangkan dan membangun kawasan perbatasan Aruk ini, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun Pemerintah Kabupaten Sambas sendiri. Bahkan pemerintah Malaysia (Negara Bagian Sarawak) memberikan respon positif atas rencana pemerintah mengembangkan kawasan Aruk-Sajingan Besar ini. Hal ini dibuktikan lewat komitmen mereka dalam pertemuan Forum Sosek Malindo di Pontianak tanggal 22 Maret 2005 yang lalu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai dampak dibukanya Perbatasan Aruk-Sajingan Besar dalam kerangka penanganan yang spesifik meliputi berbagai sektor pembangunan serta koordinasi yang efektif mulai dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Kabupaten agar akibat dibukanya perbatasan tersebut mendatangkan implikasi sosiologi yang positif kepada masyarakat, serta menyiapkan masyarakat itu sendiri untuk bersiap dalam menghadapi segala kemungkinan dalam perkembangan yang bergitu pesat nantinya di daerah dan wilayah mereka”.

## **B. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini mengenai pembangunan sosial bidang pendidikan, pelayanan kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Karena ketiga bidang inilah yang langsung menyentuh masyarakat perbatasan terutama masyarakat perbatasan Aruk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas.

## **C. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimanakah Pembangunan Sosial Masyarakat Perbatasan di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat di Bidang Pendidikan, Pelayanan Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan”?.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Pembangunan Sosial**

Konsep pembangunan sosial menurut Suharto (2009: 65) sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial. Secara kontekstual pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial ketimbang pertumbuhan ekonomi. Secara kontekstual pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial ketimbang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya konsep pembangunan sosial menurut Migley (1995: 90), merupakan suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, di mana pembangunan dilakukan saling melengkapi proses pembangunan ekonomi. Berdasarkan definisi tersebut, dapatlah kita ambil bahwa pembangunan sosial lebih luas dari pembangunan ekonomi, pada pembangunan sosial memberikan perhatian terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pengertian pembangunan biasanya dikaitkan dengan menyusun, adapun definisi pembangunan yaitu modernisasi, perubahan sosial, industrialisasi, pertumbuhan (*growth*) dan evolusi *socio cultural*. Menurut Ritzer (2006 : 76) mengartikan pembangunan sebagai proses yang terjadi pada level

atau tingkatan sistem sosial, sedangkan modernisasi menunjukkan pada proses yang terjadi pada level-level individu. Menurut Fakih (2001:10) dengan pemahaman seperti itu “pembangunan” disejajarkan dengan kata “perubahan sosial”. Bagi penganut pandangan ini konsep pembangunan adalah berdiri sendiri sehingga membutuhkan keterangan lain, seperti pembangunan model kapitalisme, pembangunan model sosialisme, ataupun pembangunan model Indonesia. Dalam hal ini Arkanuddin (2010:24) menyamakan pembangunan sosial dengan perubahan sosial dan mengatakan bahwa perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tergantung kepada masyarakat itu sendiri dalam menentukan arah, pola kecepatannya. Perubahan sosial dapat dikatakan sebagai suatu perubahan dari gejala sosial yang ada di kehidupan manusia, dimulai dari individu hingga yang lebih kompleks. Selanjutnya Arkanuddin (2010:24) menyatakan aspek kehidupan yang berubah dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma sosial, pola perilaku, organisasi masyarakat, kekuasaan, wewenang serta interaksi sosial.

Rukminto (2003 : 45) mengatakan bahwa Proses pembangunan sosial dipengaruhi oleh dua dimensi yaitu dimensi makro yang menggambarkan bagaimana pemerintah atau institusi negara melalui kebijakan dan peraturan, system regulasi yang dibuatnya mempengaruhi proses perubahan dalam masyarakat. Sedangkan dimensi mikro di mana individu-individu dan kelompok masyarakat mempengaruhi proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan sosial kawasan perbatasan Kalimantan Barat yang berhadapan langsung dengan negara tetangga Serawak (Malaysia Timur) sepanjang kurang lebih 857 Km, yang mencakup di lima wilayah yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sintang, Kabupaten, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sanggau. Sasaran dari pembangunan kawasan perbatasan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang selama ini masyarakat perbatasan Kalimantan Barat merupakan masyarakat yang dikategorikan penduduk miskin, hal tersebut disebabkan daerah perbatasan merupakan daerah yang masih “terisolasi”, karena kurangnya sarana dan prasarana yang ada diperbatasan. Karakteristik perkembangan kawasan perbatasan antar negara khususnya di Desa Aruk kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas merupakan kawasan relatif tertinggal dan terisolir dengan sarana prasarana wilayah yang sangat terbatas. Selain itu sebagian besar aksesibilitas antar pusat-pusat pertumbuhan dirasakan sangat kurang akibat terbatasnya jaringan lintas batas jalan baik jaringan jalan antar desa yang kurang memadai dan terbatasnya sarana prasarana kebutuhan dasar seperti penyediaan air bersih, listrik dan telekomunikasi.

Suratman (2008 : 6) Rencana pembangunan pengembangan kawasan perbatasan fokus pada tiga hal yaitu : (1) pengembangan kapasitas kawasan perbatasan, (2) pembangunan perekonomian perbatasan, dan (3) pembangunan sosial budaya perbatasan. Untuk dapat mewujudkan kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan menjadi suatu konsepsi pembangunan yang jelas, komprehensif dan integratif dengan perencanaan pembangunan Kalimantan Barat diperlukan system pendataan dan perangkat analisis yang tepat. Sedangkan Usman (2004 : 15) hal lain yang perlu dipikirkan ketika pembangunan daerah menjadi prioritas, adalah masalah interaksi antar instansi pemerintah yang selama ini sebagai akibat dari ciri strategi pembangunan yang masih ditandai oleh sifat *executive planning*, instansi pemerintah di daerah lebih banyak mengembangkan jalur hubungan vertikal dengan atasannya sendiri (tingkat pusat atau Provinsi) ketimbang menjalin koordinasi horizontal dengan instansi-instansi lain. Pendekatan pembangunan sosial yang berusaha menumbuhkan keberdayaan kepada masyarakat hendaknya menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan, bukan sebaliknya hanya berposisi sebagai objek pembangunan. Di samping itu pula dalam memandang kemiskinan tidak secara streatif dan seragam, karena setiap daerah memiliki variasi persoalan yang berbeda dan mempunyai ciri khas. Pendekatan pembangunan sosial sudah selayaknya mampu menampung permasalahan yang beraneka ragam oleh karena itu

harus memberi peluang kepada masyarakat untuk secara leluasa mencari solusi terhadap persoalan yang menimpa.

## **2. Pembangunan Sosial Masyarakat Bidang Pendidikan di Perbatasan**

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar dan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 mengamanatkan bahwa salahsatu arah kebijakan pembangunan pendidikan adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Arah kebijakan pembangunan pendidikan untuk melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayanikeragaman peserta didik dan potensi daerah, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional telah pula dilaksanakan. Penambahan jam pelajaran untuk muatan lokal ditujukan untuk mengakomodasi keragaman kebutuhan di setiap wilayah meskipun pelaksanaannyamasih belum optimal dan secara umum baru digunakan untuk pendidikan kesenian lokal dan bahasa daerah. Kurikulum berbasis kompetensi yang dikembangkan diharapkan dapat menjawab diversifikasi kebutuhan pembangunan. Reposisi pendidikan kejuruan terus dilakukan untuk lebih menjamin kesesuaian atau relevansi antara pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Bidang studi yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan terus direposisi menjadi bidang studi yang memiliki prospek yang baik dalam dunia kerja.

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya.

Dalam upaya mencapai pembangunan sosial yang berkelanjutan (*sustainable development*), sektor pendidikan memainkan peranan sangat strategis yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik. Analisis atas investasi dalam bidang pendidikan menyatu dalam pembangunan sosial yang berhubungan langsung manusia. Manusia sebagai modal pembangunan (*human capital*) adalah istilah yang sering digunakan oleh para ekonom untuk pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia yang lain yang dapat meningkatkan produktivitas jika hal-hal tersebut ditingkatkan. Pendidikan memainkan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan . (Todaro, 2004: 78).

## **3. Pembangunan Sosial Bidang Pelayanan Kesehatan di Perbatasan**

Pembangunan kesehatan harus selalu dilakukan mengingat jumlah penduduk yang selalu bertambah dari tahun ke tahun. Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk dilakukan antara lain dengan meningkatkan fasilitas dan sarana kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Salah satu modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi adalah kondisi kesehatan masyarakat yang baik. Di dalam pembangunan ekonomi juga harus diperhatikan pelaksanaan pembangunan kesehatan. Keduanya

ini harus berjalan seimbang agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan bagi semua yaitu kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan kesehatan yang dimaksud merupakan proses perubahan tingkat kesehatan masyarakat dari tingkat yang kurang baik menjadi yang lebih baik sesuai dengan standar kesehatan. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan merupakan pembangunan yang dilakukan sebagai investasi untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Lincoln (1999) menjelaskan intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin. Kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2004: 6).

#### **4. Pembangunan Sosial Masyarakat Bidang Pengentasan Kemiskinan di Perbatasan**

Teori kemiskinan budaya (*cultural proverty*) yang dikemukakan oleh Lewis, seperti yang dikutip Suharto (2009:135) menyatakan bahwa kemiskinan (internal) dapat muncul sebagai akibat adanya nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang miskin seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja, sedangkan faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, seperti birokrasi, peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki (kemiskinan struktural). Kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari konteks pembangunan sosial. Menurut Korten, seperti yang dikutip oleh Sulistiyani (2004:37) ada dua pendekatan yaitu pendekatan *top-down* merupakan bentuk *blue print strategi* (cetak biru) merupakan pendekatan yang bersumber pada pemerintah, sebaliknya pendekatan *bottom-up* adalah pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai pusat pembangunan atau pusat perubahan sehingga terlibat langsung di dalam proses perencanaan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi, pendekatan ini sering disebut sebagai *people centered development*.

Menurut Usman (2004: 33) keterbelakangan pembangunan (*underdevelopment*) khususnya di daerah perbatasan antara Negara mencakup masalah kemiskinan dan kesenjangan. Kemiskinan adalah sebuah kondisi kehilangan (*deprivation*) terhadap sumber-sumber pemenuh kebutuhan dasar yang berupa pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Mereka yang berada dalam katagori miskin, hidupnya serba kekurangan, sedangkan kesenjangan adalah sebuah kondisi di mana di dalamnya terjadi ketimpangan akses pada sumber-sumber ekonomi (*economic resources*). David Cox (2004), seperti yang dikutip oleh Suharto (2009:132) membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi :

1. Kemiskinan yang disebabkan globalisasi
2. Kemiskinan yang berhubungan dengan pembangunan
3. Kemiskinan sosial, kemiskinan yang dialami perempuan, anak dan kelompok minoritas

Kemiskinan konsekuensial, kemiskinan yang terjadi akibat kejadian atau faktor eksternal simiskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan dan tingginya jumlah penduduk. Konsepsi kemiskinan yang bersifat multidimensional kiranya lebih tepat jika digunakan sebagai pisau analisis dalam mendefinisikan kemiskinan dan merumuskan kebijakan pembangunan sosial di daerah perbatasan khususnya di Desa Aruk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Ellis seperti yang dikutip Suharto (2009:133) menyatakan dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial psikologis dan secara ekonomi pula kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meingkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Selanjutnya konsepsi pembangunan sosial yang diajukan oleh Midgley (dalam Suharto 2009:13)

mendefinisikan sebagai “ *a process of planned social change designed to promote the well being of population as a whole in conjunction with a dynamic process of economic development*”.

Menurut Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (2011) Faktor- faktor penyebab suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal antara lain :

1. Secara geografis daerah tertinggal relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh dari pedalaman, perbukitan, pegunungan, kepulauan, pesisir dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis yang sulit dijangkau oleh jaringan transportasi maupun media komunikasi.
2. Sumber Daya Manusia yang pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan yang relatif rendah serta kelembagaan adat belum berkembang.

Kemiskinan *multi dimensional*, artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran aspek lainnya. Dan aspek lain dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu manusianya baik secara individual maupun kolektif. (Arshad, 1999:145). Ukuran kemiskinan menurut Nurkse (dalam Arshad, 1999:148), secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi dua pengertian :

- a. Kemiskinan Absolut
- b. Kemiskinan Relatif

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada makna, penalaran, definisi dalam situasi atau konteks tertentu. Penelusuran masalah pokok yang kemudian dijabarkan pada hal-hal yang spesifik. Pendekatan kualitatif lebih mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir. (Sanafiah Faisal, 1995 : 34). Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang diutarakan sebelumnya, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yaitu untuk menggambarkan secara terperinci fenomena sosial serta menganalisa secara mendalam. Lebih lanjut Nasution (1996:45), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang-orang dalam hidupnya berinteraksi, mereka berusaha memahami bahasa mereka dan tafsirannya tentang dunia sekitarnya. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Subjek penelitian dan sasaran penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas dengan dilengkapi informan penelitian sebagai sumber data melalui wawancara dengan pemimpin formal dan informal seperti camat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Instrumen penelitian yang dipergunakan berupa pedoman wawancara, *cheks list*, kamera/ *handycamp*, dan *tape recorder*. Selanjutnya data yang diperoleh dilakukan *tehapan* kategorisasi/klasifikasi, analisis (proses reduksi data), selanjutnya dilakukan penafsiran data dan pemeriksaan data atau verifikasi.

## HASIL PENELITIAN

### A. Pembangunan Sosial Daerah Perbatasan Bidang Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Sambas juga melaksanakan program daerah guna membangun di Kecamatan Sajingan Besar, seperti akan dibangunnya Sekolah Menengah Atas (SMA) terpadu yang merupakan sekolah unggulan di mana diharapkan mutu pendidikan di daerah perbatasan dapat mengimbangi kemajuan-kemajuan khususnya pendidikan di perbatasan Malaysia. Rendahnya pendidikan masyarakat di daerah perbatasan akan mempersulit jalannya pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sajingan Besar pada awalnya ada kendala terutama memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai penggunaan lahan dan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi setelah dibantu Ketua Adat dan Camat Sajingan Besar, masyarakat mau mengerti dan memberikan bantuan terutama kemudahan dalam pembebasan lahan tersebut. Pendidikan juga merupakan prioritas bagi pemerintah dalam pembangunan daerah perbatasan, sehingga anak-anak usia sekolah di desa-desa Kecamatan Sajingan Besar telah memahami arti pentingnya pendidikan. Sekolah Dasar yang telah ada di desa-desa terpencil di daerah perbatasan, diungkapkan pula oleh Pemerintah Sambas dengan membangun Sekolah Menengah Atas (SMA) percontohan (unggulan). Sekolah ini nantinya diharapkan dapat mengimbangi pendidikan di negara Malaysia (Biawak- Sarawak) minimal pendidikan di desa Kecamatan Sajingan Besar, yang pada saat ini anak-anak di daerah perbatasan yang ingin meneruskan pendidikannya untuk ke SMA tidak perlu keluar jauh untuk sekolah.

Rendahnya pendidikan masyarakat di Kecamatan Sajingan Besar menyebabkan pengetahuan masyarakat daerah tersebut juga rendah. Hal ini diungkapkan oleh camat Sajingan Besar. Masyarakat berpendidikan rendah sangat mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, karena itu sangat mudah bagi orang luar untuk menghasut agar mereka melakukan hal-hal yang melanggar peraturan. Oleh karena itu, pendidikan masyarakat harus menjadi prioritas bagi pemerintah, dengan didirikannya sekolah-sekolah terutama Sekolah Dasar (SD) diharapkan tingkat buta huruf masyarakat menjadi berkurang bahkan tidak ada masyarakat yang buta huruf. Pembangunan sekolah-sekolah di desa-desa di perbatasan juga diperhatikan agar jarak masyarakat dan sekolah tidak terlalu jauh. Sampai dengan tahun 2009 dilakukan berbagai upaya sistematis dalam pemerataan dan perluasan pendidikan, khususnya dalam konteks pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun. Penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun memperhatikan pelayanan yang adil dan merata bagi penduduk yang menghadapi hambatan ekonomi dan sosial-budaya (yaitu penduduk miskin, memiliki hambatan geografis, daerah perbatasan, dan daerah terpencil). Demikian juga anak-anak yang memiliki kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual. Strategi yang diambil antara lain dengan membantu dan mempermudah mereka yang belum berkesempatan mengikuti pendidikan, baik di sekolah atau di madrasah, putus sekolah, serta lulusan SD/MI/SDLB yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB yang masih besar jumlahnya, untuk memperoleh layanan pendidikan. Dalam strategi ini juga ditempuh penerapan kelas-kelas inklusi, yakni dengan memberi kesempatan kepada peserta didik yang mempunyai kelainan untuk belajar bersama peserta didik yang normal.

Solusi lain yang ditawarkan dalam pembangunan sosial bidang pendidikan adalah peningkatan akses pendidikan melalui pembukaan kesempatan bagi pihak swasta dalam mendirikan lembaga pendidikan tinggi baru. Namun, strategi ini harus dikaitkan dengan kualitas dalam rangka peningkatan daya saing bangsa. Dalam pengendaliannya perlu dibuat persyaratannya yang ketat dalam mengizinkan partisipasi swasta ini. Untuk itu, pemerintah harus membenahi peraturan dan perundang-undangan serta memperkuat kapasitas kelembagaan yang terkait dengan fungsi pengendalian dan penjaminan kualitas. Kebijakan perluasan pendidikan tinggi ini juga diarahkan dalam upaya membuka kesempatan bagi calon mahasiswa yang berasal dari penduduk di atas usia ideal pendidikan tinggi (lebih dari 24 tahun) seperti karyawan, guru, tenaga spesialis industri, dan mencakup perluasan pendidikan non-gelar serta pendidikan profesi yang mengutamakan



penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja industri. Untuk menjangkau populasi yang lebih luas namun terkendala oleh berbagai faktor, seperti letak geografis dan waktu, perluasan akses pendidikan tinggi juga dilakukan melalui pengembangan kapasitas pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Kemungkinan penggunaan modus pembelajaran jarak jauh ini bukan hanya oleh universitas terbuka tetapi juga oleh perguruan tinggi lain yang diberi izin dalam pengimplementasian strategi ini.

## **B. Pembangunan Sosial Daerah Perbatasan Bidang Pelayanan Kesehatan**

Pembangunan daerah perbatasan di Kecamatan Sajingan Besar yang tidak terfokus pada satu aspek saja, tetapi harus dilakukan diberbagai aspek. Pembangunan sarana kesehatan dilakukan agar kesehatan masyarakat lebih baik, dengan dibangunnya polindes-polindes di desa-desa terpencil dimaksudkan agar jarak tempuh masyarakat dengan pelayanan kesehatan lebih dekat. Pembangunan daerah perbatasan juga melihat faktor manusianya. Jumlah penduduk juga memengaruhi dibangunnya daerah-daerah perbatasan. Di desa-desa Kecamatan Sajingan Besar jumlah kelahiran lebih besar dibandingkan dengan jumlah kematian, seperti yang dikatakan oleh Camat Sajingan Besar yang menyatakan bahwa kesehatan masyarakat menjadi prioritas bagi pemerintah dalam pembangunan sosial. Dengan terpenuhi kebutuhan kesehatan bagi masyarakat akan dipermudah bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di desa-desa di wilayah itu.

Terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam bentuk Reformasi Pembangunan Kesehatan Masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan menghilangkan kesenjangan pembangunan kesehatan antar daerah, antar sosial ekonomi, serta meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu. Adapun reformasi bidang kesehatan dilakukan melalui 7 upaya, yaitu revitalisasi primary health care (PHC) dan sistem rujukannya, serta pemenuhan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); ketersediaan, keterjangkauan obat di seluruh fasilitas kesehatan, termasuk saintifikasi jamu; ketersediaan, distribusi SDM Kesehatan yang bermutu secara adil dan merata; pengembangan jaminan kesehatan; penanganan daerah bermasalah kesehatan (PDBK), dan peningkatan pelayanan kesehatan di DTPK; pelaksanaan reformasi birokrasi serta *world class health care*. Pada tahun 2010 Kementerian Kesehatan meluncurkan Program BOK. Program ini merupakan bantuan Pemerintah Pusat pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk block grant, guna mendukung peningkatan fungsi Puskesmas dan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Sementara itu, untuk meningkatkan transparansi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat, sejak tahun 2010 Kementerian Kesehatan telah menyediakan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) pada seluruh proses pengadaan barang dan jasa. Dengan LPSE, Kementerian Kesehatan dapat melakukan efisiensi/ penghematan sebesar Rp 188 M pada tahun anggaran 2010. LPSE telah mendapat penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di Kementerian kesehatan telah membentuk Unit Layanan Terpadu. Jenis pelayanan yang disediakan antara lain pelayanan perizinan sarana sediaan farmasi, PBF, Bahan Baku Obat, Ekspor-Import Napza dan Prekursor; pelayanan rekomendasi pengobat tradisional asing; pelayanan Ethical Clearance penelitian kesehatan; pelayanan registrasi (STR) Dokter/Dokter Gigi; pelayanan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik; serta pelayanan urusan kepegawaian. Kementerian kesehatan juga memiliki Pusat Tanggap Respon Cepat (PTRC) yang diberikan antara lain penerimaan informasi pengaduan yang berasal dari masyarakat, lembaga/institusi maupun berita media massa; penyebaran/distribusi informasi pengaduan kepada Unit terkait baik di tingkat Pusat (Unit Utama dan UPT Kementerian Kesehatan) maupun di daerah; konfirmasi dan klarifikasi kasus informasi pengaduan yang masuk; serta penyampaian jawaban penyelesaian kasus informasi pengaduan kepada peminta/publik.

Selain masalah gizi, kesehatan anak Indonesia juga terus membaik. Angka kematian Balita, bayi, maupun neonatal terus menurun. Angka kematian Balita menurun dari 97 pada tahun 1991 menjadi 44 per 1.000 kelahiran hidup (KH) pada tahun 2007 (SDKI). Angka kematian bayi, menurun dari 68 menjadi 34 per 1.000 KH pada periode yang sama. Angka kematian neonatal menurun dari 32 menjadi 19 kematian per 1.000 KH. Sementara target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 adalah 32/1.000 KH untuk Angka Kematian Balita dan 23 per 1.000 KH untuk angka kematian bay, angka kematian ibu menurun dari 307 per 100.000 KH pada tahun 2002 menjadi 228 per 100.000 KH pada tahun 2007 (SDKI). Target tahun 2014 adalah 110 per 100.000 KH. Salah satu cara yang paling efektif untuk menurunkan angka kematian ibu adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan.

Secara nasional persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih meningkat dari 66,7 persen pada tahun 2002 menjadi 77,34 persen pada tahun 2009 (Susenas). Angka tersebut terus meningkat menjadi 82,3 persen pada tahun 2010. (Data Riskesdas, 2010). Jampersal merupakan pelayanan paket kesehatan berupa kontrol terhadap ibu hamil (*antenatal*), persalinan, kontrol setelah melahirkan (*postnatal*) dan pelayanan keluarga berencana. Paket ini berlaku untuk persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, mulai dari Polindes, Puskesmas dan rumah sakit pemerintah di kelas tiga. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS difokuskan pada upaya menekan angka prevalensi kasus HIV dan meningkatkan persentase orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mendapat Anti Retroviral Treatment (ARV). Faktor risiko penularan HIV paling banyak melalui hubungan seksual sebesar 50,3% dan pengguna narkoba dengan jarum suntik (IDU) sebesar 40,2%. Saat ini angka prevalensi kasus HIV telah berhasil dipertahankan pada kisaran 0,2%. Sedangkan persentase penderita ODHA yang mendapat ARV sudah mencapai 76,8% pada tahun 2010.

### **C. Pembangunan Sosial Daerah Perbatasan Bidang Pengentasan Kemiskinan**

Kemiskinan eksplisit adalah sebagai sebuah fenomena dilihat bagaimana upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan sampai sejauh mana upaya tersebut mampu meraih apa yang diinginkan. Cara pandang tersebut sangatlah sempit sifatnya dan menjebak kita pada pendekatan partial yang tidak memberikan solusi komperenship, oleh karena itu program pengentasan kemiskinan hanya terfokus pada bagaimana kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, bukan mencari jalan keluar untuk meringankan beban kemiskinan dengan melalui usaha meningkatkan beban kemampuan. Berbeda dengan pandangan yang melihat kemiskinan sebagai suatu fenomena, cara pandang tersebut melihat kemiskinan dengan lebih tajam pada akar permasalahan yang dihadapi. Kemiskinan sebagai proses sistemik yang tereduksi dari berbagai faktor dalam hal ini kemiskinan dipengaruhi oleh banyak aspek dibentuk melalui kondisi suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan demikian kemiskinan tidak terlepas bagaimana program yang dicanangkan, kebijakan alokasi sumber daya baik *natural resources*, teknologi sumber daya manusia, selain itu pula manajemen dan distribusi sumber daya tersebut.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Kuncoro, 1997:85). Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tersebut meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan ukuran pendapatan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Apabila dilihat berdasarkan pola waktu, kemiskinan dapat dibedakan menjadi empat, meliputi (1) *persistent proverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun menurun; (2) *cyclical poverty*, merupakan kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan; (3) *seasonal poverty*, adalah kemiskinan musiman yang sering dijumpai pada kasus nelayan dan pertanian; dan (4) *accident poverty*, yaitu kemiskinan yang tercipta karena adanya bencana alam, konflik, dan kekerasan, atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. (Kuncoro, 1997:97).

#### **D. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat**

##### **1. Faktor Pendukung Pembangunan Sosial Masyarakat di Perbatasan Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas**

Pembangunan daerah perbatasan sebagaimana dalam Propenas 2000 - 2004 lebih diorientasikan pada peran pemerintah daerah untuk mampu mengelola daerah tersebut dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Asumsinya, pemerintah daerah diharapkan mampu menangani daerah perbatasan yang berada di daerah masing-masing, dengan demikian persoalan yang menyangkut daerah perbatasan akan dapat berjalan secara efektif, karena pembangunan daerah perbatasan juga merupakan pembangunan daerah. Sehingga kebijakan - kebijakan yang menyangkut daerah perbatasan dalam PROPENAS 2000 - 2004 dikategorikan sebagai persoalan daerah. Artinya, isu daerah perbatasan belum menjadi agenda pembangunan prioritas, yang ditangani secara komprehensif dan terpadu. Rencana Pembangunan Nasional (Repenas) 2005 - 2006, persoalan yang muncul terkait dengan daerah perbatasan adalah rendahnya kemampuan pemerintah untuk membangun dan membina daerah perbatasan, hal ini masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Kurang menyentuhnya kegiatan pembangunan di daerah perbatasan yang berdampak pada rendahnya tingkat kemakmuran masyarakat, menjadikan masyarakat daerah perbatasan merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Minimnya pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara pada daerah perbatasan, menjadikan sebagian masyarakat di daerah perbatasan merasa bukan bagian dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kondisi ini telah menurunkan rasa nasionalisme dan menumbuhkan keinginan sebagian masyarakat di daerah perbatasan untuk menjadi warga negara tetangga dengan cara memindahkan patok tapal batas. Di Kalimantan Barat terjadi pemindahan patok tapal batas yang cukup memprihatinkan dan telah mencapai 8 kilometer menjorok ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sini tampaknya, isu pengembangan daerah perbatasan mengalami pergeseran masyarakat daerah perbatasan merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Dalam pada itu Repenas pada gilirannya memberikan perhatian yang lebih besar pada masyarakat yang berada pada daerah perbatasan, sebagai masyarakat yang kurang beruntung dalam menjangkau pelayanan pemerintah; terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur, serta problem hukum. Perhatian yang lebih besar pada kawaasn perbatasan ini juga dapat dilihat pada kebijakan terkait pengembangan daerah perbatasan, dimana daerah perbatasan menjadi perioritas utama dalam pembangunan nasional.

Kebijakan tersebut adalah, "Melalui Pembangunan Daerah, upaya untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam kerangka NKRI didorong melalui peningkatan kerjasama antar daerah serta pengembangan daerah perbatasan dengan menjadikan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara sehingga terjalin hubungan yang harmonis dengan negara tetangga serta dengan menggali potensi ekonomi, sosial, dan budaya, serta potensi lokasi perbatasan." Berangkat dari gagasan ini, tampaknya konsep program pengembangan daerah perbatasan dijadikan sebagai program terpadu dan komprehensif yang ditangani oleh pemerintah pusat dan daerah. Sebagai kelanjutan dari Repenas 2005 - 2006 adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004 - 2009. Dimana Repenas merupakan rencana pembangunan nasional transisi, peralihan dari pemerintahan 2000 - 2004 yang rencana - rencana programnya masuk dalam koridor Propenas 2000 - 2004.

Dalam RPJM 2004 - 2009, secara eksplisit, daerah perbatasan disebut masih merupakan bagian daerah yang mengalami ketimpangan pembangunan. Sehingga sasaran pembangunan dalam konteks ini, adalah: Terwujudnya percepatan pembangunan di wilayah-wilayah cepat

tumbuh dan strategis, wilayah tertinggal, termasuk wilayah perbatasan dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’ yang terintegrasi dan sinergis. Sedangkan kebijakan yang secara eksplisit menyebut daerah perbatasan adalah: Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking*, sehingga daerah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan (*security approach*), juga diperlukan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*).

Dalam konsep pembangunan perbatasan di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas hendaknya daerah perbatasan ini dijadikan sebagai “Teras Rumah” Indonesia, hal ini Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bappeda Kabupaten Sambas, beliau mengatakan : bahwa anggapan daerah perbatasan sebagai daerah pinggiran, terbelakang harus diubah dan menjadikan daerah perbatasan sebagai teras depan negara Indonesia. (hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Sambas, 7 Agustus 2012). Demikian pula yang dikatakan Camat Sajingan Besar, selama ini daerah perbatasan lebih banyak dipandang sebagai daerah “belakang” yang harus dijaga dari ancaman pemberontak, penyelundup, dan gerombolan lain yang dianggap sebagai pengacau keamanan. Karena itu, daerah perbatasan menjadi daerah yang terlupakan, tertinggal dan terpencil, tempat yang baik bagi perdagangan ilegal dan tidak tersentuh oleh kegiatan pembangunan. (Hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Sambas, 7 Agustus 2012). Oleh karena itu, masyarakat berharap keinginan menjadikan daerah perbatasan menjadi teras rumah jangan hanya sebagai wacana dan sekedar memberi kesenangan sesaat bagi masyarakat perbatasan. Membangun daerah perbatasan pada masa kini dimana kondisi keamanan regional relatif stabil dan ancaman pemberontak relatif berkurang, maka perlu dipertimbangkan aspek-aspek lain selain keamanan seperti aspek sosial, ekonomi, dan budaya. (hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Sambas, 7 Agustus 2012). Pada masa lalu pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada aspek keamanan, sesuai dengan kondisi dan paradigma yang digunakan saat itu. Namun saat ini dimana negara tetangga telah mengembangkan daerah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, maka masyarakat berharap pendekatan kesejahteraan yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan negara, perlu dijadikan sebagai landasan bagi penyusunan perencanaan berbagai kegiatan. Begitu pula dengan kualitas sumberdaya manusia di daerah perbatasan pada umumnya masih relatif rendah jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal ini disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, serta komunikasi dan perhubungan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Pada beberapa kampung, sebagian masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, perhubungan, dan komunikasi yang tersedia di negara tetangga. (Hasil wawancara dengan Camat Sajingan Besar Kabupaten Sambas, 7 Agustus 2012).

Masyarakat berharap pembangunan sarana dan prasarana sosial, seperti sekolah, pusat kesehatan, fasilitas perhubungan, dan komunikasi dapat segera dilakukan, dengan kualitas yang setara dengan yang ada di negara tetangga. Jika tidak, dikhawatirkan jumlah masyarakat perbatasan yang sekolah dan berobat di negara tetangga akan terus meningkat. Hal ini dapat mengganggu kedaulatan negara dari perspektif ekonomi dan politik. Masyarakat juga berharap kecamatan-kecamatan di daerah perbatasan yang memiliki potensi ekonomi dapat dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan bagi daerah disekitarnya, termasuk wilayah bagian dalam (*hinterland*) dari daerah perbatasan. (Hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Sambas, 7 Agustus 2012).

Untuk lebih mengefektifkan dan mempercepat pembangunan di daerah perbatasan, maka harapan masyarakat sebaiknya di sepanjang daerah diberlakukan sebagai daerah khusus yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Agar daerah khusus tersebut terkelola dengan baik serta dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah pusat perlu

segera menyerahkan beberapa kewenangan kepada daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan yang mudah dan cepat, seperti kebijakan pertanahan, perumahan, perizinan investasi asing, prosedur ekspor-impor dan lain-lain. (Hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Sambas, 7 Agustus 2012). Masyarakat perbatasan berharap hasil kesepakatan bilateral dengan negara tetangga segera ditindaklanjuti dengan pembangunan pos lintas batas yang bersifat tradisional bagi penduduk di daerah perbatasan, untuk selanjutnya dapat ditingkatkan statusnya menjadi tempat pemeriksaan imigrasi. Sarana dan prasarana perbatasan yang telah ada tetapi masih bersifat darurat, perlu dilakukan standarisasi dan dipercepat peningkatan kualitasnya. Akibat kualitas jalan yang jelek masyarakat perbatasan terpaksa mengeluarkan ongkos angkut yang relatif besar jika bepergian ke ibukota Kabupaten. (Hasil wawancara dengan Camat Sajingan Besar, 7 Agustus 2012).

Salah faktor yang menyebabkan investor kurang tertarik menanamkan modalnya di daerah perbatasan adalah tidak adanya kepastian hukum dan atau lemahnya penegakan hukum. Hal ini terjadi akibat banyak faktor, seperti ketidakjelasan status daerah, ketidakjelasan wewenang, sulitnya koordinasi, minimnya aparatur, terbatasnya infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan lain-lain. Masyarakat perbatasan berharap faktor-faktor penyebab tersebut dapat segera diatasi sehingga penegakan hukum di daerah perbatasan dapat terwujud. (Hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Sambas, 7 Agustus 2012).

## **2. Faktor Pendukung Pembangunan Sosial Masyarakat di Perbatasan Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Bidang Pendidikan**

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas masyarakat terhadap pendidikan berkualitas merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam menjalankan kehidupan sosial yang lebih sejahtera karena pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia sebagai pelaku sekaligus objek pembangunan. Dengan kondisi tingkat pendidikan penduduk wilayah perbatasan yang masih relatif rendah dibandingkan dengan masyarakat Malaysia, maka berbagai upaya untuk memperbaiki akses penduduk terhadap pendidikan yang berkualitas haruslah dipercepat dalam rangka membentuk sumberdaya manusia yang tangguh dan berbaya saing baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM didasarkan kepada pemikiran bahwa pendidikan tidak sekedar menyiapkan peserta didik agar mampu masuk dalam pasaran kerja, namun lebih daripada itu, pendidikan merupakan salah satu upaya pembangunan watak bangsa (*national character building*) seperti kejujuran, keadilan, keikhlasan, kesederhanaan dan keteladanan. Arah kebijakan peningkatan, perluasan dan pemerataan pendidikan dilaksanakan melalui antara lain; penyediaan fasilitas layanan pendidikan berupa pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas dan penyediaan fasilitas pendukungnya, serta penyediaan berbagai beasiswa dan bantuan dana operasional sekolah yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Kebijakan strategi pembangunan pendidikan di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas difokuskan pada dua hal lain yaitu peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dan pemerataan dan perluasan jangkauan pendidikan. (Hasil wawancara dengan Kepala Diknas Kabupaten Sambas).

Pemerataan dan perluasan jangkauan pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan besar merupakan salah satu sasaran dalam pembangunan pendidikan. Pemerataan dan perluasan pendidikan dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan tidak dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama dan lokasi geografis. Kebijakan ini menekankan bahwa setiap orang tanpa memandang asal-usulnya mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada semua jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan. Pemerataan ini dimaksudkan untuk mencapai keadilan dan

kesejahteraan yang merata. Untuk mencapai hal tersebut Kabupaten Sambas dan Kecamatan Sajingan Besar menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam mengelola Sekolah yang ada di Kecamatan Sajingan Besar. (Hasil wawancara dengan Kepala Diknas Kab. Sambas). Partisipasi masyarakat akan lebih nyata masing-masing sekolah, karena program tersebut mendorong dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan di masing-masing sekolah, sehingga masyarakat menyadari bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama termasuk masyarakat dan pemerintah. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2006, Kabupaten Sambas merintis program tersebut di Kecamatan Sajingan.

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) sejak 2009 lalu telah meluncurkan program peningkatan kualitas tenaga didik di daerah-daerah yang letaknya berbatasan langsung dengan negara luar. Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas merupakan salah satu daerah yang tersentuh program ini karena merupakan wilayah yang letaknya berbatasan langsung Serawak Malaysia Timur. Begitu pula Kabupaten Sambas memberi perhatian khusus terhadap sektor pendidikan di daerah perbatasan dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidik. (Hasil Wawancara dengan Kepala Diknas Kabupaten Sambas, 10 Agustus 2012).

Program Bidang Pendidikan, dengan kegiatan antara lain : Program Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah; Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah (Pembangunan TK Negeri, Pembangunan USB SD, Penambahan RKB, Rehabilitasi Gedung SD, Pengadaan Meubelair Sekolah, Pengadaan Buku Paket Siswa, Pengadaan Buku Perpustakaan, Sekolah, Pembangunan Mess Murid), Program Pendidikan Menengah (Penambahan RKB SMPN 1, Pembangunan Ruang, Laboratorium SMPN 1, Pembangunan Ruang Perpustakaan SMPN 1, Pembebasan Tanah SMK, Sajingan, Penambahan RKB SMK, Pengadaan Alat-alat Praktek SMK, Rekrutmen Tenaga Pengajar SMK, Rekrutmen Instruktur Bidang Kejuruan SMK, Pembangunan Laboratorium SMK, Pengadaan Perlengkapan Laboratorium SMK, Pengembangan Program Kejuruan SMK, Pengadaan Sarana Transportasi Roda 2. (Wawancara dengan Kepala Diknas Kab. Sambas 6 Agustus 2012).

### **3. Faktor Pendukung Pembangunan Sosial Masyarakat di Perbatasan Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Bidang Pelayanan Kesehatan**

Dalam RKP 2005 Departemen Kesehatan, salah satu arah kebijakannya adalah: "Peningkatan kualitas, keterjangkauan, dan pemerataan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama bagi keluarga miskin, kelompok rentan dan penduduk di daerah terpencil, perbatasan dan rawan bencana/konflik dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender melalui pelaksanaan program prioritas nasional yang disesuaikan dengan masalah dan ketersediaan sumber daya lokal; peningkatan kegiatan luar gedung; peningkatan advokasi, sosialisasi dan informasi kesehatan; pengembangan dan pemenuhan sumber daya." Di sini disebutkan bahwa daerah perbatasan sebagai sasaran program. Tapi, dalam rincian kegiatannya tidak disebutkan daerah perbatasan mana yang menjadi sasaran program tersebut. Dan pada laporan akhirnya disebutkan bahwa salah satu kendalanya adalah karena "Terbatasnya akses penduduk miskin atas pelayanan kesehatan, baik karena kendala geografis maupun kendala biaya."

Gambaran ini menunjukkan kurang kompaknya sesama instansi yang terlibat dalam perencanaan pengembangan daerah perbatasan, karena lemahnya koordinasi dan kontrol pada lembaga penyelenggara. Problem Kelembagaan dalam konteks ini juga dapat dilihat pada dua sisi tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Pertama lembagakan perencana dan evaluasi. Dalam perencanaan yang paling abstrak (*grand design*) dilaksanakan dan dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dengan demikian, tentu saja perencanaan secara menyeluruh telah dibuat dalam satu atap di instansi ini. Sedangkan untuk

operasionalisasinya telah dibuat oleh masing - masing instansi yang terdiri dari 28 instansi Kementerian/ Departemen. Pada tahap ini, merupakan tahap yang rawan terjadinya *multiinterpretasi*, yakni masing - masing instansi Kementerian/ Departemen punya potensi untuk memahami dan sekaligus melakukan perencanaan yang berbeda dengan apa yang diharapkan oleh Bappenas.

Pembangunan di bidang kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar manusia, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia guna mendukung pembangunan sosial daerah perbatasan yang memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Perbatasan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Derajat kesehatan masyarakat di Kecamatan Sajingan Besar mengalami peningkatan yang berarti dalam periode waktu 4 tahun terakhir, hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, bertambahnya tenaga medis dan fasilitas kesehatan sehingga berbagai permasalahan kesehatan masyarakat seperti wabah penyakit menular, kekurangan gizi pada balita dan ibu hamil dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, telah dilakukan berbagai upaya pelayanan kesehatan masyarakat khususnya kurun waktu 2008-2011. (Hasil wawancara dengan Kepala Diskes Kab. Sambas 8 Agustus 2012).

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kecamatan Sajingan Besar adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan kesehatan sebaik mungkin dengan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat serta pemberian pengobatan gratis.
2. Terbentuknya desa sehat dan kecamatan sehat.
3. Meningkatkan mutu kesehatan dan gizi masyarakat yang ditandai dengan peningkatan harapan hidup, menurunkan tingkat kesakitan dan kematian khususnya bayi dan ibu melahirkan.
4. Meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan.
5. Meningkatkan cakupan pelayanan puskesmas.
6. Mewujudkan perilaku sehat bersih bagi masyarakat
7. Mengembangkan sistem informasi dan pelayanan kesehatan. (Hasil wawancara dengan Kepala Diknas Kab. Sambas).

#### **4. Faktor Pendukung Pembangunan Sosial Masyarakat di Perbatasan Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Bidang Pengentasan Kemiskinan**

Besarnya jumlah pengangguran di Kecamatan Sajingan Besar yang mencapai 40,18 % merupakan permasalahan yang cukup krusial dan perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah. Berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja telah dilakukan dalam rangka mewujudkan tenaga kerja yang profesional dan berdaya saing tinggi, yang mampu membuka dan memberikan peluang kerja yang luas baik ditingkat lokal maupun regional. Pembinaan hubungan industri, kewirausahaan para pekerja formal/informal diupayakan secara maksimal. Pembinaan pemasaran kepada para kelompok usaha mandiri juga dilaksanakan, disamping tetap memperhatikan norma keselamatan kerja berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan.

Peningkatan sumber daya manusia dilaksanakan melalui DIKLAT serta menjalin kerja sama dengan semua pihak dan daerah dalam rangka pemerataan mobilitas penduduk. (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas, 12 Agustus 2012). Daerah perbatasan memiliki sumberdaya alam yang sangat kaya akan keanekaragaman

hayati. Hampir seluruh daerah perbatasan terdiri atas hutan tropis dan daerah konservasi. Potensi sumberdaya alam berupa hutan tropis dan daerah konservasi ini diharapkan masyarakat dapat dilindungi kelestariannya selain dibudidayakan bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Selama ini harus diakui bahwa kesulitan ekonomi telah memaksa penduduk untuk terlibat dalam kegiatan *illegal logging*, sehingga langkah pemberantasan menjadi semakin rumit. (Hasil wawancara dengan Camat Sajingan Besar, 7 Agustus 2012).

Masyarakat perbatasan berharap terjadi peningkatan hubungan dengan negara tetangga di bidang sosial, ekonomi, dan keamanan. Peningkatan hubungan ini mereka yakini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Salah satu bentuk kerjasama dalam bidang keamanan yang perlu diprioritaskan untuk segera dilaksanakan adalah penetapan batas antar negara yang sampai saat ini belum jelas di beberapa titik daerah perbatasan.

Bentuk kerjasama lainnya adalah dalam bidang ekonomi, seperti perubahan terhadap nilai maksimum perdagangan lintas batas yang saat ini disepakati sebesar 600 RM per bulan. Masyarakat berharap segera dilakukan perubahan karena nilai 600 RM tersebut pada saat ini dirasakan terlalu kecil. (Hasil wawancara dengan Camat Sajingan Besar, 7 Agustus 2012). Masyarakat perbatasan berharap adanya pemberdayaan masyarakat di sepanjang perbatasan dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Program yang dapat dilakukan antara lain melalui penyediaan tempat usaha dan teknologi tepat guna sesuai dengan sumberdaya alam yang potensial dilingkungannya. (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas, 12 Agustus 2012).

Program ini diharapkan akan memberikan nilai tambah berupa pendapatan yang lebih tinggi kepada masyarakat dari kegiatan produksinya. Bantuan lain yang diharapkan masyarakat adalah terpenuhinya secara rutin pasokan kebutuhan pokok seperti sembako, bahan makanan pokok lainnya dan keperluan sehari-hari melalui kerjasama dengan aparat keamanan. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga kestabilan harga, sehingga masyarakat tidak dihadapkan pada tingkat harga kebutuhan pokok yang relatif tinggi. (Hasil wawancara dengan Camat Sajingan Besar, 7 Agustus 2012).

##### **5. Faktor Penghambat Pembangunan Sosial Masyarakat di Perbatasan Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas**

Salah satu hal yang mendasar untuk mengetahui perkembangan kebijakan perencanaan program pengembangan daerah perbatasan adalah dibutuhkannya riwayat/ data pembangunan daerah perbatasan dari masa ke masa yang lengkap dan konsep ideal daerah perbatasan yang jelas sebagai acuan perencanaan pengembangan daerah perbatasan ini. Sayangnya, riwayat/ data pembangunan daerah perbatasan belum terkoordinir secara integral pada sebuah lembaga/ departemen tertentu. Data-data pembangunan daerah perbatasan ini masih terserak di lembaga-lembaga/ departemen-departemen yang melaksanakan program pembangunan daerah perbatasan. Sehingga perkembangan pembangunan daerah perbatasan sebelumnya tampak kurang terlaksana kurang sistematis. Kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan yang miskin infrastruktur dan tidak memiliki aksesibilitas yang baik, pada umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi di negara tetangga. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat, pada umumnya berorientasi ke negara tetangga Malaysia. Hal ini disebabkan adanya infrastruktur yang lebih baik atau pengaruh sosial ekonomi yang lebih kuat dari wilayah negara tetangga. Secara jangka panjang, adanya kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga tersebut berpotensi untuk mengundang kerawanan di bidang sosial ekonomi dan politik. Kondisi demikian menyebabkan sebagian besar desa di sepanjang perbatasan sulit dijangkau (terisolir) dan secara umum menikmati infrastruktur dasar yang sangat terbatas. (Hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Sambas, 7 Agustus 2012). Akibatnya, investor swasta tidak tertarik untuk masuk ke



daerah ini, sehingga sumberdaya alam yang demikian potensial belum dapat dikelola secara optimal.

Selama ini daerah perbatasan belum mendapat perhatian dari pemerintah. Meskipun RPJMN 2004-2009 telah mengamanatkan arah kebijakan pembangunan daerah perbatasan, yaitu “menjadikan daerah perbatasan sebagai beranda depan NKRI, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi daerah perbatasan, dan memantapkan ketertiban dan keamanan perbatasan”. Namun pada tataran implementasi ternyata tidak demikian, karena terbukti selama periode 2004-2009 tidak terjadi peningkatan kegiatan pembangunan yang berarti di daerah perbatasan. Wajar jika kekhawatiran kembali muncul dalam memandang implementasi dari RPJMN 2010-2014. (Hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Sambas, 7 Agustus 2012).

Desentralisasi dan otonomi daerah sesungguhnya telah memberikan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Namun dalam pembangunan daerah perbatasan sebagian besar kewenangan masih berada pada pemerintah pusat, dengan alasan untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan sosial ekonomi yang bersifat lintas administrasi wilayah pemerintahan sehingga diperlukan koordinasi dari institusi yang secara hirarkis lebih tinggi. Akan tetapi karena jarak yang begitu jauh dari Jakarta ke perbatasan, maka kewenangan ini belum dapat dijalankan oleh pemerintah pusat dengan baik. Kondisi ini makin diperparah oleh belum berfungsinya BNPP (paling tidak hingga saat tesis ini disusun), lembaga yang secara khusus ditunjuk oleh pusat untuk mengelola keseluruhan aspek pembangunan di daerah perbatasan.

Dalam konteks ini, tidak jarang masing-masing level pemerintahan berebut pengaruh di perbatasan ketika ada potensi penerimaan dan sebaliknya seolah lepas tanggung jawab pada saat timbul masalah. Akibatnya, perbatasan menjadi daerah “remang-remang” yang dinikmati oleh segelintir oknum, berasal dari kedua negara, untuk menumbuh-suburkan kegiatan ilegal. Mereka ini merupakan kelompok yang sebagian besar justru bukan berasal dari masyarakat perbatasan serta cenderung tidak menginginkan adanya kejelasan kewenangan dan jalur koordinasi dalam penanganan daerah perbatasan. (Hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Sambas, 7 Agustus 2012).

Beberapa pelanggaran hukum yang terjadi di daerah perbatasan terkadang tidak ditegakkan dengan baik. Efek dari penegakan hukum yang masih lemah, maka berbagai bentuk pelanggaran hukum sering terjadi di daerah perbatasan. (Hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Sambas, 7 Agustus 2012). Masalah ini memerlukan penanganan dan antisipasi yang seksama dan sungguh-sungguh. Luasnya wilayah yang harus ditangani serta minimnya prasarana dan sarana telah menyebabkan aktivitas aparat keamanan dan kepolisian sejauh ini belum dapat dilakukan secara optimal. Di sisi lain, sebagai konsekuensi terbatasnya prasarana, sarana, dan sumberdaya manusia dibidang pertahanan dan keamanan, telah menyebabkan lemahnya pengawasan di sepanjang garis perbatasan. Akibatnya adalah sering terjadi pelanggaran batas negara oleh masyarakat kedua negara, serta berbagai bentuk pelanggaran hukum seperti aktivitas pencurian kayu (*illegal logging*), penyelundupan barang, dan penjualan manusia (*trafficking person*).

Kesamaan budaya, adat, dan keturunan di daerah perbatasan telah melahirkan kegiatan lintas batas tradisional, yang sebagian diantaranya bersifat ilegal dan sulit dicegah. (Hasil wawancara dengan Camat Sajingan Besar, 7 Agustus 2012).

Kegiatan lintas batas tradisional ini telah berlangsung lama dan pada awalnya didorong oleh kebutuhan dan manfaat bersama bagi penduduk kedua negara di perbatasan. Kegiatan ini bahkan telah diatur melalui perjanjian perdagangan lintas batas Indonesia–Malaysia pada tanggal 11 Mei 1967, yang mengizinkan penduduk melakukan transaksi maksimum 600 RM per bulan. Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu, kegiatan lintas batas tradisional tersebut mulai

dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dari kedua negara untuk melakukan kegiatan ilegal, yaitu berupa transaksi dagang yang melebihi ketentuan atau bahkan berupa penyelundupan. Kegiatan ilegal ini khususnya dilakukan untuk jenis komoditi yang memiliki selisih harga relatif tinggi diantara kedua negara. Ironisnya, pelaku kegiatan ilegal ini sebagian besar justru penduduk yang berasal dari luar perbatasan. Kalaupun ada penduduk asli perbatasan terlibat umumnya karena kepolosan dan ketidaktahuan, dan mereka memperoleh peran serta bagian keuntungan yang kecil. (Hasil wawancara dengan Camat Sajingan Besar, 7 Agustus 2012).

#### **6. Faktor Penghambat Pembangunan Sosial Masyarakat di Perbatasan Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Bidang Pendidikan**

Dewasa ini kita masih menjumpai berbagai kenyataan yang menunjukkan bahwa masih terkendalanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang dialami oleh anak-anak yang hidup di daerah-daerah terpencil. Masalah ini bukan hanya terkait akses terhadap pendidikan berkualitas semata, tetapi pendidikan dengan tingkat kelayakan atau kualitas yang terbatas pun masih sangat sulit untuk diperoleh. Status pendidikan penduduk di perkotaan dan perdesaan bisa dikaitkan dengan besar pengeluaran rumah tangga mereka per bulan. Mayoritas penduduk di desa memiliki besar pengeluaran rumah tangga Rp 100.000-Rp 149.000 sebulan. Sementara penduduk di kota lebih besar pengeluarannya, yaitu pada rentang Rp 200.000-Rp 299.000. (Hasil wawancara dengan Kepala Diknas Kabupaten Sambas 10 Agustus 2012). Selanjutnya mengenai kualitas pendidikan di Perbatasan Sajingan Besar Kabupaten Sambas juga dinilai masih rendah karena belum sepenuhnya mampu memberikan kompetensi sesuai dengan tahap pendidikan yang dijalani peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh: (1) ketersediaan pendidik yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas; (2) terbatasnya ketersediaan buku-buku pelajaran; (3) kesejahteraan pendidik yang masih rendah; (4) sarana dan prasarana belajar belum tersedia secara mencukupi; (5) biaya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai; (6) belum efektif dan efisien manajemen pendidikan di era desentralisasi dan otonomi pendidikan; serta (7) belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah. (Hasil wawancara dengan Kepala Diknas Kab. Sambas, 6 Agustus 2012).

#### **7. Faktor Penghambat Pembangunan Sosial Masyarakat di Perbatasan Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Bidang Pelayanan Kesehatan**

Adapun beberapa isu, permasalahan dan tantangan yang mewarnai pembangunan kesehatan di Perbatasan Aruk Sajingan Kabupaten Sambas ini antara lain adalah: (1) rendahnya status kesehatan dan gizi masyarakat; (2) rendahnya pelayanan kesehatan oleh Tenaga medis terhadap penduduk miskin sehingga memperlambat pelayanan, memperlambat rujukan, kesulitan administrasi serta lamanya waktu tunggu; (3) terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan khususnya di wilayah terisolir dan pedalaman juga kendala biaya (*cost barrier*); (4) rendahnya kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dibandingkan jumlah penduduk dan ketersebaran domisili; (5) rendahnya kuantitas semua jenis Tenaga kesehatan yang dibutuhkan dikarenakan distribusi yang tidak merata dan kesejahteraan yang kurang mendapat perhatian; serta (6) rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Program Bidang Kesehatan, dengan kegiatan antara lain : Pemberdayaan Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat Masyarakat; Peningkatan Upaya Kesehatan; Peningkatan Puskesmas; Pembangunan dan Rehabilitasi Polindes; Pengadaan Alat Medis Ruang Rawat Inap dan UGD; Pengadaan Alat Medis dan Bidan Set; Pengadaan Ambulance; Pengadaan Kendaraan Roda 2; Pengadaan Speed Boat; Pengadaan Radio Medik; Pengadaan Cold Chain Solar Sel; Pembangunan Rumah Dinas Dokter; Pembangunan Rumah Dinas Paramedis; Pengadaan Peralatan Medis; Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan; Penyediaan Tenaga Perawat, Tenaga Adm dan Bidan Desa; Pengadaan

Jaringan Komunikasi dan Komputer; Pengadaan Dental Unit; Pelatihan SDM Medis dan Paramedis. Pemberdayaan Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat, Masyarakat Peningkatan Upaya Kesehatan, Peningkatan Puskesmas (Peningkatan Ruang Rawat Inap dan UGD, Renovasi Pustu Temajok menjadi Pustu Plus, Rehabilitasi Puskesmas, Renovasi Pustu Sebunga menjadi Pustu Plus, Pembangunan Ruang UGD Sederhana, Pembangunan Ruang Rawat Inap, Pembangunan Ruang Pelayanan KIA, Pembangunan Ruang Rawat Inap di Pustu, Rehabilitasi Puskesmas Pembantu, Pembangunan Ruang UGD, Pembangunan Laboratorium Sederhana), Pembangunan dan Rehabilitasi Polindes (Rehabilitasi Pustu dan Polindes, Pembangunan Polindes, Rehabilitasi Polindes), Pengadaan Alat Medis Ruang Rawat Inap dan UGD, Pengadaan Alat Medis dan Bidan Set, Pengadaan Ambulance, Pengadaan Kendaraan Roda 2, Pengadaan Speed Boat, Pengadaan Radio Medik, Pengadaan Cold Chain Solar Sel 2, Pembangunan Rumah Dinas Dokter, Pembangunan Rumah Dinas Paramedis, Pengadaan Peralatan Medis, Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan, Penyediaan Tenaga Perawat, Tenaga Adm dan Bidan Desa, Pengadaan Jaringan Komunikasi & Komputer, Pengadaan Dental Unit, Pelatihan SDM Medis dan Paramedis. (Hasil wawancara dengan Kepala Diskes Kab. Sambas 10 Agustus 2012).

#### **8. Faktor Penghambat Pembangunan Sosial Masyarakat di Perbatasan Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Bidang Pengentasan Kemiskinan**

Upaya pengurangan penduduk miskin, selain guna meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat, untuk meningkatkan hak dan martabatnya, juga salah satu cara untuk meningkatkan daya saing di masa depan. Ini dilakukan melalui perbaikan kemampuan si miskin, sehingga akan membuka jalan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi setiap tingkatan ke tingkat yang lebih tinggi. Pada gilirannya, usaha pengentasan kemiskinan ini akan mengarah pada daerah yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi. Selama ini kecenderungan pembangunan sosial bidang pengentasan kemiskinan di daerah perbatasan terutama perbatasan Kecamatan Sajingan masih sangat terbatas. (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sambas 8 Agustus 2012).

Adapun program di bidang pengentasan kemiskinan di Perbatasan Sajingan Besar Kabupaten Sambas diantaranya: Peningkatan keterampilan petani, Peningkatan kapasitas kelembagaan petani, Peningkatan kewirausahaan petani, Pembangunan Pelabuhan Perikanan daratan, Pembangunan Sarana & Prasarana Dasar Daerah Industri Pengolahan. (Hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Kab. Sambas 6 Agustus 2012). Sebagian besar masyarakat wilayah perbatasan masih menyandarkan hidupnya pada sektor pertanian, kehutanan, oleh karena itu perlunya dilakukan optimalisasi menyeluruh guna menggali potensi wilayah serta memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola potensi yang ada secara selektif, efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahtraannya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pembangunan sosial masyarakat perbatasan di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat masih tertinggal jauh, kondisi ini dapat dilihat dari kualitas sumberdaya manusia di daerah perbatasan pada umumnya masih relatif rendah jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal ini disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, serta dan terbatasnya pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di bidang pendidikan masih rendah karena belum sepenuhnya mampu memberikan kompetensi sesuai dengan tahap pendidikan yang dijalani peserta didik, ini disebabkan ketersediaan pendidik yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas; terbatasnya ketersediaan buku-buku pelajaran; kesejahteraan pendidik yang masih rendah;

sarana dan prasarana belajar belum tersedia secara mencukupi; biaya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai; belum efektif dan efisiennya manajemen pendidikan di era desentralisasi dan otonomi pendidikan; serta belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Di bidang Kesehatan masih sangat rendah, kondisi ini terlihat dari masih terbatasnya akses penduduk miskin atas pelayanan kesehatan, baik karena kendala geografis maupun kendala biaya, dan Dinas Kesehatan masih terus membangun dan meningkatkan infrastruktur Kesehatan yang ada di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Sebagian besar masyarakat wilayah perbatasan di Kecamatan Sajingan Besar masih menyandarkan hidupnya pada sektor pertanian, kehutanan, oleh karena itu perlunya dilakukan optimalisasi menyeluruh guna menggali potensi wilayah serta memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola potensi yang ada secara selektif, efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraannya.

#### **B. Saran dan Rekomendasi**

Pembangunan Sosial Masyarakat Perbatasan di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat hendaknya daerah perbatasan ini dijadikan sebagai “Teras Rumah” Indonesia jangan hanya sebagai wacana dan sekedar memberi kesenangan sesaat bagi masyarakat perbatasan. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan harus segera dilaksanakan khususnya dalam bidang Pendidikan, Pelayanan Kesehatan dan dibukanya pusat-pusat ekonomi masyarakat. Percepatan pembangunan tiga bidang ini dalam rangka membentuk sumberdaya manusia yang tangguh dan berdaya saing baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia didasarkan kepada pemikiran bahwa pendidikan tidak sekedar menyiapkan peserta didik juga merupakan salah satu upaya pembangunan watak bangsa. Akselerasi pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dan peningkatan sumber daya manusia bidang harus ditingkatkan, mengingat perbedaan sarana dan prasarana yang sangat jauh dibandingkan dengan Serawak, oleh karena itu keterlibatan semua pihak dalam bidang Kesehatan ini perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi Pembangunan Sosial Masyarakat Perbatasan di Kecamatan Sajingan Bidang Pengentasan Kemiskinan dan pengngguran secara berkelanjutan diperlukan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, lebih adil dan berkesinambungan yang didukung oleh sumber-sumber pertumbuhan yang lebih berkualitas di wilayah perbatasan. Sehubungan dengan untuk mencapai pertumbuhan yang terus meningkat, harus terus menggerakkan sektor riil, investasi dalam negeri maupun luar negeri serta ekspor harus terus dipacu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alkadri. et.al (penyunting). 2001. *Manajemen Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah*. Edisi Revisi. Jakarta: Pusat Pengembangan Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah-BPPT Press.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi keempat, BPFE Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, 2011. *Kecamatan Sajingan Besar Dalam Angka*.
- Bappeda. 2011. *Pembangunan Kawasan Perbatasan*, Pontianak, Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Kalimantan Barat.
- Blue Print Pengembangan Kawasan Perbatasan Paloh Sajingan (PALSA).
- Chambers, Robert, 1983, *Pembangunan Desa-Mulai Dari Belakang*, Jakarta: LP3ES.
- Dewan Perwakilan Daerah bekerjasama dengan Universitas Tanjungpura Pontianak, 2009. *Laporan Penelitian Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kalimantan Barat)*.
- Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Kimpraswil, 2003, *Kebijakan dan Strategi Spasial Pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan – Sarawak –Sabah( KASABA)*, Jakarta : Ditjen Penataan Ruang Dept. Kimpraswil.
- Edgington, David.W and Fernandez, Antonio.L. 2001. The Changing Context of Regional Development. In Edgington, David W. et.al.(eds). *New Regional Development Paradigms*, Vol. 2, p.3-14. London : Greenwood press.
- Edi, Suharto, (2009), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial, Bandung, Aditama.
- Faisal, Sanafiah.1999. *Format-format Penelitian Sosial, Dasar dan Aplikasi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Faqih, Mansour. (2001). *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta, Insist Press Printing.
- Hamid. et.al. (eds). 2001. *Kawasan Perbatasan Kalimantan : Permasalahan dan Konsep Pengembangan*. Jakarta :Pusat Pengembangan Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah-BPPT Press.
- Huraerah, Abu, 2011. *Pengorganisasian Pengembangan Masyarakat, Model Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Bandung, Humaiora.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, *Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Buku Utama Prinsip Dasar, Arah Kebijakan, Strategi Dan Program Pembangunan*.
- Koentjaraningrat. 1983. *Kebudayaan, Mentalis dan Pembangunan*. Jakarta PT. Gramedia.
- Martodirjo, 1991. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Midgley, James, 1995. *Social Development: The Development Perspective in Social Welfare*, London: Sage Publication.
- Moleong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mudrajad, Kuncoro, 1997, *Ekonomi Pembangunan, Teori, masalah dan kebijakan*, Cetakan pertama, Unit penerbitan dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- Mukti, Sri Handoyo. 2003. “*Konsep Pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan Indo Malay Techno Agropolitan Corridor (IMTAC)*”. Bulletin Tata Ruang, hal. 8-9. September-Oktober.
- Nasution, 1996. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2010 – 2014.
- Pontianak Post, 25 Maret 2005.
- Rasidin K dan Bonar M, 2004. *Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium*. Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Makalah.
- Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Perbatasan Kabupaten Sambas Tahun, 2001. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas, 2001.
- Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Buku rinci Di Provinsi Kalimantan Barat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.
- Ritzer, George, Goodman, J. Douglas. 2007. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Rukminto, Adi, Isbandi,. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*. Edisi Revisi, Jakarta. LPFE UI.
- Sihombing, Togam. 2008. *Pentingnya Pos Lintas Batas (PLB) Aruk Ditingkatkan Menjadi Tampat Pemeriksaan Imigrasi*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 2. No 1 April 2008. Hal: 53-71.
- Simatupang, Pantjar dan Saktyanu K. Dermoredjo, ( 2003 ), “*Produksi Domestik Bruto, Harga dan Kemiskinan : Hipotesis Trickle Down*”, Dikaji Ulang, Media Ekonomi dan Keuangan Indonesia Vol. 51 (3).
- Soetomo, 2008. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial dan Pengembangan Masyarakat: Perspektif Pekerjaan Sosial*, Makalah. Disampaikan pada Seminar Nasional “Komunikasi Pembangunan Mendukung Peningkatan SDM dalam Kerangka Pengembangan Masyarakat”, Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia (FORKAPI), IPB Convention Center, Bogor 19 November 2009. Diakses tanggal 10 Agustus 2012.
- Sulistiyani, Teguh,Ambar, 2004, *Kemitraan dan Model-model pemberdayaan*, Jogjakarta, Gava Media.
- Suratman, Edy, 2008, *Kawasan Perbatasan dan Pembangunan Daerah*, Pontianak, Untan Press.
- Suryawati, Chriswardani, 2004. Kepuasan Pasien Rumah Sakit (Tinjauan Teoritis dan Penerapannya pada Penelitian), Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan Vol.07/No.04/2004,UGM Press, Yogyakarta.
- Teguh Sulistiyani, Ambar. 2004. *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Gava Media, Yogyakarta.
- Todaro, Michael.P, 2004 *.Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga Edisi VI*. Jakarta : Erlangga.
- Undang Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- Usman, Soeyoto, 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.